

Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban

Yusuf Hariyoko¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
Email: yusufhari@untag-sby.ac.id

Abstract

Implementation of SME's development in Tuban District. The development of SME's becomes an responsibility for every region, because of this sector is able to absorb a lot of labor and also have positive developments in economic development efforts in the region. The theory used are economic development and SME's. The results of this study are 1) Local government commitment in the development of MSMEs is still not optimal and can be improved further by strengthening the various sectors supporting the development of SME's. 2) In the development of SME's in Tuban Regency is the responsibility of several parties, but there are still some parties whose role and business is still not optimal. 3) The types of activities that have been carried out varied and attempted responsively may be undertaken by local governments, but there are still some important records that need to be improved. It aims to improve the quality of the people's economy from the macro and micro sectors

Keywords: *SME's, Economic Development*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pada saat dapat dianggap berhasil apabila pendapatan perkapita tinggi, mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya pada saat itu, dan berkelanjutan hingga masa mendatang. Selain itu, juga ada berbagai faktor pendukung yang digunakan sebagai perbandingan keberhasilan tersebut. Faktor atau aspek lain tersebut seperti, failitas umum, infrastruktur, sosial, lingkungan, dan dengan berjalannya waktu, pembangunan juga mempertimbangkan masyarakat sebagai agen pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berbasis pada masyarakat, sebelumnya berkembang dengan usaha padat karya pada industri besar, sehingga mampu untuk mengurangi pengangguran. Pada masa sekarang pergeseran paradigma dan perubahan kondisi masyarakat, memudahkan masyarakat untuk menciptakan berbagai usaha dengan bentuk UMKM yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu, mulai dari kuantitasnya, hingga kualitas dari UMKM tersebut yang berubah menjadi usaha besar.

Peran UMKM dalam ekonomi sangat mencolok, selain alternatif mengurangi pengangguran, UMKM juga mampu untuk menjadi sektor perekonomian yang mampu untuk menyokong sistem perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada momentum krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008 yang terjadi di seluruh dunia, tidak memberikan pengaruh yang besar pada UMKM dengan jumlah tenaga kerjanya. Banyak negara yang mengalami masalah yang parah pada sistem perekonomian mereka, apalagi negara yang mengandalkan sistem perhutangan di barat. Pengaruh dari krisis tersebut adalah tingginya inflasi pada tahun 2008 sebesar 11,06 persen yang tercatat pada data BPS. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil membuat negara lain melirik Indonesia sebagai negara yang layak di perhatikan dalam sistem perekonomian dunia, karena dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa pasca krisis global.

Peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat menurut Fajrin (2010) Ada 2 tugas yang berkaitan dengan bidang ekonomi, yaitu: Fasilitator: Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik; dan Stimulator: Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Peran tersebut juga tidak terlepas dengan tugasnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Pemerintah harus mampu untuk menjadi fasilitator dan juga stimulator yang bisa menciptakan pengembangan ekonomi masyarakat di bidang UMKM.

UMKM sebagai senjata dalam pengembangan masyarakat memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahan pengembangan ekonomi yang lain.

¹ Penulis pertama

Sektor UMKM dalam perekonomian memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari karakteristik dari sektor UMKM itu sendiri (Tambunan, 2012:2-7), sebagai berikut: “Modal tidak perlu besar; Bisa dilakukan di mana saja; Pasar yang diambil dimulai dari daerah sekitar; Sistem manajemen yang sederhana; Sistem produksi yang sederhana; Pemanfaatan teknologi sederhana; serta Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar”. Kelebihan tersebut harusnya mampu untuk dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan masyarakat melalui UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu daerah dengan kondisi UMKM yang potensial, juga memiliki berbagai usaha dalam mengembangkan UMKM. Jumlah UMKM terbaru 223.998 unit dengan serapan 370.537 tenaga kerja di kabupaten tuban. Hal ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari perkembangan tahun sebelumnya dengan rincian pada tahun 2013 terdapat 48.031 UMKM, pada tahun 2014 terdapat 53.968 dan pada tahun 2015 terdapat 65.355. peningkatan jumlah yang signifikan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah kabupaten tuban yang diberikan untuk mengembangkan sektor UMKM.

Kajian Teori

Pengembangan Ekonomi

Isu yang berkembang dalam kebijakan ekonomi, tiap ahli memiliki pandangan sendiri-sendiri. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua isu besar, isu-isu dalam bidang ekonomi menurut Reynold, dkk (1973) dikelompokkan menjadi makro dan mikro. Isu tersebut di antaranya: 1) Makro: Pengangguran dan inflasi, Uang yang ada di satu kawasan, Kebijakan fiskal, Otomatisasi, dan Pertumbuhan ekonomi. Serta pada bidang ekonomi mikro terdiri dari: Kompetisi layanan kesehatan dan social, Konsumen, Harga dan lingkungan, Distribusi pendapatan ekonomi dan kemiskinan, dan Kapitalisme hitam.

Tambunan (2010) menyebutkan ada beberapa Stakeholders yang berperan dalam pengembangan ekonomi, diantaranya: 1) Pemerintah; 2) Swasta; 3) Partai dan kelompok politik; 4) sumber pendidikan, akademisi, dan periset; 5) Peran Militer dan penjaga keamanan; dan 6) LSM. Dalam pengembangan ekonomi lokal dari beberapa aktor tersebut, ada empat macam peran yang dapat dilakukan oleh *stakeholder*. Menurut Blakely (85-88:2003) Di antaranya: 1) Entrepreneur/developer, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, dan 4) Stimulator.

UMKM

UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) secara normatif dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diartikan satu persatu. Pengertian dalam normatif tersebut di antaranya: Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil; serta Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana sesuai dengan peraturan perundangan.

Karakteristik dari UMKM menurut Tambunan (2012:2-5) adalah sebagai berikut: 1) Jumlahnya banyak dan tersebar; 2) Sangat padat karya; 3) Dilakukan oleh berbagai lapisan; 4) Teknologi yang digunakan memiliki proporsi yang cocok dengan faktor produksi dan kondisi; 5) Kemampuannya yang dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi; 6) Modal yang digunakan berasal dari tabungan pribadi pemilik; 7) Sumber lain yang modal masih berkaitan dengan pemilik usaha; 8) Produk yang dihasilkan relatif murah dan sederhana; 9) Dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan; dan 10) Fleksibel dan mampu bertahan melawan pesaing dari industri besar.

Metode Penelitian

Metode penelitian berdasarkan pendekatan peneliti dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan penelitian dengan mengembangkan penelitian yang diawali dari masalah. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tuban dengan instansi pemerintahan yang diteliti adalah Dinas Perekonomian dan Pariwisata. Fokus penelitian yang digunakan dasar penelitian adalah 1) Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, 2) Karakteristik dari agen pelaksana, dan 3) Jenis kegiatan dan manfaat yang dihasilkan.

Metode pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, dan menggunakan data sekunder dengan mengoptimalkan bahan penelitian yang berasal dari dokumen pemerintahan, publikasi, dan liputan yang berasal dari media massa terkait dengan tema penelitian.

Hasil Penelitian

Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM

Komitmen pemerintah dalam pengembangan UMKM ditunjukkan dengan visi dan misi yang diangkat oleh kepala daerah melalui RPJMD yang merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Tuban sudah memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi. Komitmen tersebut ada pada misi-misi yang mengedepankan masyarakat sebagai sasaran pembangunan ekonomi. Pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tuban berada pada prioritas ke delapan dengan anggaran kurang dari 1% dan masih dibagi dengan pengembangan sektor koperasi. Sehingga hal yang kontradiktif ini menjadi pertanyaan terkait dengan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban dalam pengembangan UMKM.

Pengembangan UMKM oleh pemerintah merangkul berbagai pihak dalam melaksanakannya yang memiliki perhatian pada bidangnya masing-masing, seperti pemasaran, produksi, logistik, permodalan, dan CSR. Hal ini sesuai dengan teori pengembangan ekonomi lokal dari Tambunan (2010) yang menyebutkan bahwa semua pihak yang berkepentingan harus terlibat dan melakukan peran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Enam pihak tersebut ada pemerintah, swasta, parpol, lembaga pendidikan, petugas keamanan, dan LSM. Namun pada kenyataannya masih peran dari semua pihak masih belum optimal dan diberikan ruang oleh pemerintah Kabupaten Tuban.

Dinas Perekonomian dan Pariwisata yang merupakan SKPD yang bertanggung jawab dalam pengembangan UMKM, membagi fokus pengembangan menjadi tiga aspek sasaran, yaitu produksi, manajemen, dan pemasaran. Kegiatan dan program yang dikembangkan oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata tersebut sedikit banyak sudah membantu UMKM untuk berkembang. Namun dari pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut masih belum nampak fokus pengembangannya. UMKM dengan berbagai kelebihannya harusnya mampu menjadi penyokong ekonomi mandiri daerah. Kebijakan yang diberikan pemerintah daerah, juga harus mampu mendukung tumbuhnya sektor UMKM, atau masyarakat memiliki semangat untuk menciptakan lapangan usaha dan juga sektor usaha yang sudah ada dapat berkembang dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak lepas pula dukungan dari aspek anggaran, karena dengan anggaran yang cukup akan memperlancar kebijakan dan layanan yang diterima oleh masyarakat.

Karakteristik dari agen pelaksana

Tugas pemerintah yang nampak dilakukan tersebut sesuai dengan pendapat Blakely (2003) adalah sebagai regulator dan fasilitator. Pelaksanaan tugas tersebut, khususnya dalam pengembangan UMKM pemerintah Kabupaten Tuban yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata yang sesuai tupoksinya salah satunya adalah untuk mengembangkan UMKM dengan dukungan dari Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai tupoksinya. Teori pengembangan ekonomi lokal juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya harus ada kerja sama semua pihak berkepentingan yang ada di kawasan tersebut. Peran pemerintah sebagai developer, dan koordinator juga harus dikembangkan, karena saat ini peran tersebut masih kurang.

Pada pelaksanaan tupoksinya, Dinas Perekonomian dan Pariwisata sangat terbatas dengan jumlah SDM. Walaupun pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata ini kekurangan SDM yang menjalankan kegiatan, tidak boleh menjadi alasan pemerintah daerah dalam menunda pengembangan UMKM. Aktivitas yang dilakukan harus dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat perencanaan yang baik dengan kinerja yang sistematis oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata. Minimnya jumlah SDM tersebut juga bertolak belakang dengan teori dari Blakely (2003) bahwa pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam pengembangan UMKM harus memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan tugas dan juga kemampuan yang mumpuni pula. Selain aspek tersebut, dikhawatirkan dengan minimnya SDM akan berdampak pula pada proses Management dalam melaksanakan tugas pengembangan ekonomi lokal.

Tambunan (2010) menyebutkan paling tidak ada 6 pihak yang harus berkolaborasi sesuai dengan kemampuan dan tupoksi mereka. Bappeda selaku pemerintah sudah dapat bekerja sesuai dengan kepentingannya dengan menciptakan perencanaan sumber perekonomian yang baru. Pihak yang berkaitan dengan pengembangan UMKM ada mulai swasta, masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, dan lembaga lain harus bekerja sesuai dengan perannya. Pihak-pihak yang bersangkutan tersebut, perannya masih belum optimal dalam pengembangan UMKM. Peran dari semua pihak sangat penting dalam pengembangan ekonomi lokal, karena secara langsung maupun tidak langsung mereka akan memberikan pengaruh dan berkontribusi bagi pengembangan UMKM. Swasta yang sudah memberikan CSR sebagai tanggungjawabnya, juga perlu

memberikan alih teknologi bagi masyarakat, sehingga mampu membuat sesuatu yang baru dan bernilai ekonomi lebih dengan teknologi tersebut dan juga UMKM dapat melakukan peningkatan produksi.

Jenis kegiatan dan manfaat yang dihasilkan

Jenis program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan UMKM yaitu dengan pelatihan, sosialisasi, dan menciptakan iklim yang kondusif dalam melakukan usaha. Program yang bersifat pelatihan lebih banyak dilakukan, karena hal tersebut dianggap lebih banyak dalam memberikan manfaat pada pengembangan keahlian pelaku UMKM. Pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan pada produksi, manajemen, dan pemasaran oleh UMKM. Program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari teori dari Grindle dalam Nugroho (2014) tentang implementasi kebijakan yang berkaitan dengan isi kebijakan. Pada SKPD lain memiliki kegiatan yang serupa pelatihan, harusnya dapat lebih berkoordinasi antar SKPD, sehingga dapat mengetahui jumlah masyarakat yang sudah menerima pelatihan dari pemerintah. Pada aspek sosialisasi juga demikian, Dinas Perekonomian dan Pariwisata harusnya dapat lebih berkolaborasi dengan SKPD dan pihak lain, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terkait kebijakan UMKM akan lebih baik. Dinas Perekonomian dan Pariwisata juga memiliki event unggulan lain yang berupa “jagongan matoh” yang digunakan sebagai ajang silaturahmi dan juga berbagi informasi oleh para pelaku UMKM dan calon pengusaha dengan ahli yang ada dalam bidangnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai sarana untuk memenuhi perannya dalam pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan ini berdampak positif untuk meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat dan juga memberikan pengetahuan pada masyarakat.

Pada perencanaan ke depan, pengembangan UMKM akan lebih disinergikan dengan sektor pariwisata dan pihak swasta. Karena pada saat ini sektor-sektor tersebut walau sudah ada kaitan dengan UMKM, namun masih belum optimal. Usaha ke depan yang akan dikembangkan adalah ekonomi kreatif. Kebijakan ini menjadi salah satu sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor ekonomi makro di Kabupaten Tuban. Kebijakan ekonomi makro menurut Reynold, dkk (1973) ini berhubungan dengan usaha untuk mengurangi pengangguran, peningkatan uang yang beredar di Kabupaten Tuban, dan pertumbuhan ekonomi. Selain pada sektor makro, dengan pengembangan ekonomi tersebut mikro pada distribusi perekonomian dan pada aspek lingkungan juga harus menjadi pertimbangan, karena aspek tersebut menjadi sarana dalam penyokong kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersifat tidak langsung, masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Kegiatan tersebut misalnya usaha pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha. Kegiatan yang tidak langsung tersebut akan memberikan dampak yang lebih terasa bagi UMKM karena akan memberikan ruang dan kemudahan UMKM untuk tumbuh.

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil rangkuman dari hasil penelitian dari implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM masih belum optimal dan mampu ditingkatkan lebih lanjut dengan penguatan pada berbagai sektor pendukung pengembangan UMKM tersebut.
2. Dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban menjadi tanggungjawab beberapa pihak, namun masih ada beberapa pihak yang peran dan usahanya masih belum optimal.
3. Jenis kegiatan yang sudah dilakukan beragam dan berusaha sereresponsif mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah, namun masih ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dari sektor makro dan mikronya.

Daftar Pustaka

- _____. 2018. “JUMLAH UMKM DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT SEKTOR DAN KABUPATEN/KOTA”. diakses pada tanggal 20 maret 2018 pada laman <http://diskopukm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=5>
- _____.2015. KBBI
- Blakely, Edward J, and Ted K. Bradshaw. 2003. *Planning local economic Development (theory dan practice)*. Third edition. Vistaar Publication: New Delhi
- Fajrin. 2010. “Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan berkelanjutan” diakses pada tanggal 12 januari 2018 dari <http://okkifajrin.blogspot.com/2010/01/pembangunan-daerah.html>
- Nugroho, Riant. 2014. *Public policy, teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Edisi kelima, revisi. Gramedia: Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

- Rahayu. 2016. "Jumlah UMKM di Tuban Bertambah Setiap Tahun" diakses pada tanggal 20 maret 2018 dari laman <http://bloktuban.com/berita-read.php/?show=1565-jumlah-umkm-di-tuban-bertambah-setiap-tahun.html>
- Reynold, Lloyd G, dkk (editor). 1973. *Current issue of economic policy*. Richard d. Irwin, inc: Home Wood
- Tambunan, Mangara. 2010. *Menggagas perubahan pendekatan pembangunan, menggerakkan kekuatan lokal dalam globalisasi ekonomi*. Graha ilmu: Yogyakarta
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Isu-Isu Penting*. LP3ES: Jakarta